

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan publik yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah [YSF - 10].

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki aset cukup besar yang mencapai Rp.1.95T [Majalah Loteng Bersatu/edisi III]. Dengan aset sebesar itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentu tidak gampang menata dan mengelola aset tersebut apalagi untuk mempertahankannya. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan keuangan daerah. Kesulitan yang sangat dirasakan oleh pemerintah daerah dalam membuat neraca awal adalah mengumpulkan data aset serta pencatatan aset pada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan menilai aset karena belum adanya pencatatan yang terintegrasi dalam satu wadah informasi pengelolaan aset.

Saat ini di Pemda Lombok Tengah telah memiliki sistem informasi manajemen aset daerah yaitu SIMDA tetapi sistem informasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih banyak kekurangan pada sistem tersebut. Oleh karena itu, Pemda Lombok Tengah sangat membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk kegiatan pengelolaan aset daerah, hal tersebut menjadi kendala

dalam pengelolaan data aset. Data aset dari semua SKPD yang diserahkan ke bagian aset Setda Lombok Tengah masih dilakukan secara manual.

Padahal untuk mendapat predikat yang baik dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) tidak terlepas dari pengelolaan aset dan keuangan yang baik karena aset yang baik adalah nilai aset dengan nilai neraca pada bagian keuangan dan bagian aset serta pada SKPD sudah sama tapi kebanyakan yang terjadi adalah aset yang tercatat tidak sama dengan yang ada dilapangan sehingga menyebabkan ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap aset tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya tata kelola aset yang tidak berjalan dengan baik dan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat dipercaya oleh *stakeholder*.

Melihat beberapa permasalahan yang ada di Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang masih belum optimal, maka diperlukan adanya sebuah keselarasan penerapan sistem informasi dengan kebutuhan organisasi pada Pemda Lombok Tengah dengan memperhatikan faktor integrasi. Oleh karena itu diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang dan mengelola sistem informasi yang disebut dengan Arsitektur Enterprise (*enterprise architecture*).

Dalam perancangan arsitektur enterprise pada penelitian ini menggunakan *Zachman Framework*. *Framework Zachman* merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian artifak enterprise [TST-13]. Kajian pustaka pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang berjudul “*Perencanaan Strategis Sistem Informasi Berbasis Zachman Framework Pada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat*” penelitian ini membahas tentang perencanaan strategis sistem informasi untuk mengidentifikasi strategi dan teknologi apa yang akan digunakan sistem informasi tersebut sesuai dengan visi, misi serta kebutuhan Disnakertrans.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul penelitian “Analisis dan Perancangan Proses Bisnis Manajemen Aset Daerah Menggunakan *Zachman Framework* (Studi Kasus Bagian Aset Setda Lombok Tengah) karena masih jarang nya penelitian yang membahas tentang pengelolaan aset daerah menggunakan kerangka kerja *Zachman Framework*.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana merancang arsitektur enterprise proses bisnis pada pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan proses bisnis di bagian aset Setda Lombok Tengah menggunakan *Zachman Framework*?
2. Bagaimana menganalisa proses bisnis pada pengelolaan aset daerah di bagian aset Setda Lombok Tengah dengan menggunakan analisa fit/gap?
3. Bagaimana mengimplementasikan *prototype* proses bisnis inventarisasi manajemen aset daerah di bagian aset Setda Lombok Tengah?

1.3 Batasan Masalah

Penyusunan skripsi ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian, karena luasnya bidang yang dihadapi penulis selama melakukan penelitian, penulis membatasi penyusunan ini berdasarkan ruang lingkup kegiatan. Batasan dari masalah pengembangan Arsitektur Enterprise ini adalah :

1. Data yang diambil adalah survey dari Bagian Aset Setda Lombok Tengah
2. Analisis dan rancangan Arsitektur Enterprise, meliputi :
 - Proses penatausahaan aset daerah
 - Proses terkait pemindahtanganan aset
 - Proses terkait penghapusan aset daerah
3. Perancangan arsitektur enterprise menggunakan beberapa perspektif dari *Zachman Framework*, yaitu Perencanaan (*Objective/Scope*), Pemilik (*Business Model*), Perancang (*Sistem Model/Designer's View*) dan Pembangun (*Technology Model/ Business View*).
4. Perancangan arsitektur enterprise ini hanya menggunakan golongan aset gedung dan bangunan.
5. Penelitian ini hanya sampai tingkat SKPD bukan tingkat terendah seperti kelurahan.
6. Implementasi berupa *prototype* pada proses inventarisasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisa dan menerapkan *Zachman Framework* pada manajemen aset daerah pada Bagian Aset Setda Lombok Tengah yang nantinya dapat mempermudah dalam manajemen pengelolaan aset daerah.
2. Mengembangkan proses bisnis yang berjalan di Pemda Lombok Tengah.
3. Mengoptimalkan kinerja dari sistem yang sedang berjalan di Pemda Lombok Tengah.

1.5 Manfaat

Penulisan laporan ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Mampu memahami dan mengerti konsep dari penerapan *Zachman Framework* pada arsitektur manajemen aset daerah.
2. Mampu memahami manfaat dari *Enterprise Archtitecture* agar organisasi dapat terdefinisi dengan mantap dan data bisa tersentralisasi.
3. Mampu mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.
4. Mempermudah dalam manajemen aset daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dasar dan pendukung, temuan, dan/atau bahan penelitian sebelumnya yang diperoleh dari berbagai sumber dijadikan dasar melakukan penelitian. Hal yang berkaitan dengan topik saja yang akan dibahas. Tinjauan pustaka merupakan rangkuman singkat yang komprehensif tentang semua materi terkait terdapat dalam sumber.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari studi literatur, perancangan proses bisnis dan perancangan perangkat lunak, implementasi perangkat lunak, pengujian dan analisis kebutuhan manajemen aset daerah.

BAB IV PERANCANGAN

Bab ini berisi perancangan yang terdiri dari analisis proses bisnis menggunakan tahapan *zachman framework*, analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi manajemen aset daerah.

BAB V IMPLEMENTASI

Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem sesuai dengan perancangan yang telah dibuat.

BAB VI PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisis terhadap sistem yang telah dibuat.

BAB VII KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan dalam proses penelitian. Kesimpulan harus mempunyai korelasi dengan rumusan masalah.

